PENGAWASAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM (Studi Kasus di Pangkalan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S-1)



ELLA DEWI TRI NIM 15042009/2015

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADAŅG
2019

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum

Gas Tabung 3 Kilogram (Studi Kasus Di Pangkalan Liquefied

Petroleum Gas 3 Kilogram Kelurahan Parupuk Tabing

Kota Padang)

Nama : Ella Dewi Tri

Tm/Nim : 2015/15042009

Program Studi : Ilmu Adıninistrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Mei 2019

Disetujui Oleh

Pembimbing 1

Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D NIP. 19700212 199802 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 Pukul 11.00 s/d 12.00 WIB

Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Studi Kasus Di Pangkalan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)

Nama : Ella Dewi Tri Nim : 15042009

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 07 Mei 2019

Tim Penguji

Nama Tanda Tangan

Ketua : Aldri Frinaldi, S.H., M.Hum., Ph.D

Anggota : Dra. Jumiati M.Si

Anggota : Nora Eka Putri S.IP., M.Si

Mengetahui Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd NIP. 19621 001198903 1 002 SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Ella Dewi Tri

NIM

: 15042009

Tempat dan Tanggal Lahir : Bangko, 09 Oktober 1996

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (studi kasus di pangkalan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)" adalah benar bahwa merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Padang, Mei 2019

Saya yang menyatakan

Ella Dewi Tri 15042009

ABSTRAK

Ella Dewi Tri 15042009: Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied

Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram (Studi Kasus di Pangkalan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram di

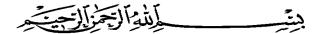
Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram ditingkat pangkalan sebesar 17.000 di Kota Padang, dalam pengawasan dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.IX/09-2017, namun dalam pengawasan yang ditemukan penulis belum optimal ditandai dengan banyaknya pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing yang menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan, tidak adanya sanksi atau tindakan yang tegas yang diberikan oleh tim pengawasan terhadap pangkalan yang melakukan penyimpangan, dan papan blank usaha Harga Eceran Tertinggi yang tidak mendapat pemeriksaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang serta hambatan dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deksriptif Kualitatif, penelitian dilakukan di Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PT. Pertamina (Persero) Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja dan pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang, informan penelitian ditentukan secara porposive sampling sedangkan penarikan sampel pada masyarakat menggunakan teknik sampling insidental. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dilakukan di Kelurahan Parupuk Tabing belum optimal ditemukan terdapat pangkalan yang tidak pernah diperiksa oleh tim pembinaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, kurangnya koordinasi, serta peraturan yang ada kurang mengakomodir pelaksanaan pengawasan dilapangan.

Kata Kunci: Pengawasan, Pangkalan, Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram (Studi Kasus di Pangkalan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)".

Shalawat beriringkan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya ke alam yang bertabur ilmu pengetahuan. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik Strata Satu (S1), pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Terealisasinya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Teristemewa penulis persembahkan kepada Ibu Triwiyanti dan Ayah Makmur Yusuf, Bang Tuhit, Bang Toro, dan Adek Ade serta anggota keluarga tercinta yang telah memberikan do'a dan motivasi yang tak pernah henti-hentinya, demi terealisasinya keinginan penulis dalam menyelesaikan studi ini dengan cepat.
- 2. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku pembimbing dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

- Penguji 1 Ibu Dra. Jumiati, M.Si dan Penguji II Ibu Nora Eka Putri S.IP.,M.Si yang telah memberikan saran dan pemasukan dalam penyempurnaan Skripsi ini.
- Dosen Pembimbing Akademik Prof. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D. serta
 Para dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas
 Negeri Padang yang telah membimbing selama perkuliahan.
- 5. Instansi terkait seperti Dinas Perdagangan Kota Padang, Sekretariat Daerah, PT. Pertamina (Persero), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang telah memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
- 6. Special Thanks to M.Hadirin S.Pd yang telah membantu dalam pengambilan data, memberikan motivasi, semangat dan mendengarkan keluh kesah serta yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang.
- 7. Sahabat tercinta Anisa Puspa Tiara, Indigo Maharani, Nova Anola, Mania Ulfa, Dian Oktaviani, Putri, Iwit, Raju Tamara, Ummy Natijah, Farhaya Berlian, Suci Asyfarina, Yoshi Indrayani, Dina Safitri, Mainisya, Rimala, Nofia Sari, Nunung, Sarwan, Dedes, Bambang, dan Resty yang memotivasi dan memberikan dorongan penulis untuk berjuang bersama.

Semoga Allah SWT memberikan pahala untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis, sebagai manusia dalam penulian skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

На	laman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	
Konsep Pengawasan Pengartian Pengawasan	
a. Pengertian Pengawasan b. Maksud dan Manfaat Pengawasan	
c. Jenis Pengawasan	
e. Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan f. Hambatan Dalam Pengawasan	
_	
g. Solusi Dalam Mengatasi Hambatan Pengawasanh. Sifat Pengawasan	
i. Tipe Pengawasan	
-	
j. Syarat Pengawasan Yang Efektif	40

2. Pengawasan Harga Eceran Tertinggi	30
a. Harga Eceran Tertinggi	30
b. Tugas Tim Pembinaan Dan Pengawasan	34
B. Penelitian Terdahulu yang Relavan	38
C. Kerangka Konseptual	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Keabsahan Data	46
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan Umum	48
B. Temuan Khusus	64
C. Pembahasan	95
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	110

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Indikator dalam Pengawasan	20
Gambar 2.2 Alur Distribusi <i>Liquified Petroleum Gas</i> 3 Kilogram	33
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang	g 53
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Padang	54
Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. Pertamina (Persero) Cabang Kota Padang	59

DAFTAR TABEL

Halama	ır
Tabel 2.1 Harga <i>Liquified Petroleum Gas</i> 3 Kilogram	2
Tabel 2.2 Nama Anggota Tim Pembinaan dan Pengawasan LPG 3 Kilogram 3	5
Tabel 2.3 Instansi Tim Pembinaan dan Pengawasan LPG 3 Kilogram	6
Tabel 3.1 Informan Penelitian	2
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Parupuk Tabing4	8
Tabel 4.2 Jumlah Pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing	9
Tabel 4.3 Tugas Dan Tanggung Jawab JR SE LPG Rayon IV Kota Padang 6	2
Tabel 4.4 Relasi JR SE LPG Rayon IV dengan Pihak Eksternal6	2
Tabel 4.5 Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan LPG 3 Kg Tahun 2018	6
Tabel 4.6 Laporan Pengawasan Liquified Petroleum Gas 3 Kilogram 20187	7
Tabel 4.7 Daftar Hadir Rapat Koordinasi LPG 3 Kilogram November 20187	2
Tabel 4.8 Nama Peserta yang Hadir Saat Rapat Koordinasi	2
Tabel 4.9 Instansi Tim Pembinaan dan Pengawasan	6
Tabel 4.10 Sanksi Terhadap Pelanggaran LPG 3 Kilogram di Kota Padang 8	3
Tabel 4.11 Jumlah Personil Pengawasan Liquified Petroleum Gas 3 Kg8	6
Tabel 4.12 Jumlah Pangkalan di Kota Padang	9

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	112
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	114
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	117
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian Sekretaris Daerah Kota Padang	119
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian Dinas Perdagangan Kota Padang	120
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian PT. Pertamina (Persero) Kota Padar	ng121
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian Satpol Pol PP Kota Padang	122

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah mengambil kebijakan ditahun 2007 untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak melalui program konvensi minyak tanah ke *Liquefied Petroleum Gas*. Agar program konvensi ini dapat berjalan, pemerintah mengambil kebijakan untuk mensubsidikan dan mengeluarkan *Liquefied Petroleum Gas* 3 kilogram yang di produksi oleh PT. Pertamina (Persero) dengan diawali memberikan tabung 3 kilogram dan peralatannya ke masyarakat, keberhasilan kebijakan ini dapat dilihat dari penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Diah, dkk 2010:173).

LPG adalah singkatan dari *liguefield petroleum gas* yang berarti gas minyak bumi yang dicairkan dan merupakan campuran dari berbagai unsur hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah dan natural gas serta komponen utamanya adalah propana dan butana. *Liguefield Petroleum Gas* 3 kilogram merupakan salah satu varian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang disubdisi oleh pemerintah yang peruntukannya untuk rumah tangga dan usaha mikro yang digunakan sebagai bahan bakar memasak, dengan penghasilan tidak lebih dari satu juta lima ratus perbulan dan usaha mikro dengan aset maksimal lima puluh juta dan beromzet maksimal tiga ratus juta pertahun.

Tindak lanjut dalam kebijakan tersebut yaitu dikeluarkannya Peraturan Presiden RI Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram bahwa dalam peraturan tersebut salah satunya pengawasan yang dilakukan berupa pengawasan Harga Eceran Tertinggi.

Kemudian lebih rincinya dalam pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dikeluarkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang Pasal 24 menyebutkan bahwa Harga Eceran Tertinggi ditetapkan dengan melihat daya beli masyarakat serta kondisi daerah tersebut dengan marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG), pemerintah daerah Provinsi bersama dengan pemerintah daerah kabupaten kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu untuk Pengguna pada titik serah di sub penyalur atau pangkalan.

Dalam pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram bersubsidi ini pemerintah kota Padang mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang No 800.IV.2294.IX/09-2017 yang didalamnya dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram yang terdiri dari beberapa instansi yaitu Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PT.

Pertamina (persero), dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, dimana tim tersebut saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan.

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Daerah Kota Padang Bapak Asnel pada tanggal 15 Januari 2019 yang menyatakan bahwa:

"Tim pembinaan dan pengawasan ini terbentuk pada tahun 2017 dan dalam tim ini melibatkan instansi terkait namun kendala kami dalam pengawasan dikarenakan koordinasi sesama instansi yang terkait dalam pengawasan kurang, karena masing-masing instansi memiliki beban kerja yang berbeda. dibentuknya Tim ini bertujuan agar *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram ini pendistribusiaanya tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjaminnya ketersediaan pasokan tabung LPG 3 kilogram sehingga dengan efektifnya pengawasan dapat melindungi masyarakat dari penyimpangan yang terjadi sehingga terpenuhinya kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat"

Peneliti menemukan beberapa permasalahan yang ditemukan dalam berita online Haluan Padang oleh Surianto bahwa pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Padang belum optimal dimana ditemukannya beberapa pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing yang tidak pernah mendapat pengawasan oleh tim pembinaan pengawasan. (Sumber: www.harianhaluan.com. tanggal 15 Oktober 2016).

Permasalahan lain yang ditemukan akibat kurang optimalnya pengawasan oleh tim pembinaan dan pengawasan ini adalah ditemukannya pangkalan yang menjual diatas Harga Eceran Tertinggi hal ini dikarenakan tim pembinaan dan pengawasan tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran saat melakukan pengawasan langsung kepangkalan yang melakukan penyimpangan, hal ini berdasarkan observasi awal

terhadap beberapa pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing yaitu dengan pemilik pangkalan Asril Aminuri Pada tanggal 19 Desember 2018 yang menyatakan bahwa :

"Bapak menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram seharga Rp. 22.000 karena bapak mengikuti harga pasaran pangkalan yang lain dan selama ini pangkalan saya belum mendapat pemeriksaan oleh tim pembinaan dan pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram."

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan salah satu pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing pemilik pangkalan Amrina Amran Pada tanggal 19 Desember 2018 yang menyatakan:

"Ibu menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram ini seharga Rp. 23.000, kalau pun ibu menjual Rp. 24.000 tetap saja cepat habisnya, selain itu pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram dibatasi padahal peminatnya banyak, dulu seminggu bisa mendapatkan 300 tabung sekarang 100 tabung seminggu saja susah, itu tidak seberapa Ibu mendapatkan untung, belum lagi jika ada tabung gas 3 kilogram yang hilang kalau pengawasan oleh tim pembinaan dan pengawasan dulu pernah dilakukan dan mendapat teguran namun setelah itu tidak ada tindak lanjut".

Sedangkan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan masyarakat setempat di Kelurahan Parupuk Tabing, dimana Ibu Martinah Pada tanggal 22 Desember 2018 yang menyatakan:

"Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Gas 3 kilogram ini tidak jelas, saya membeli dipangkalan (A) menjual seharga Rp. 20.000 dipangkalan (B) menjual seharga Rp. 21.000 dipangkalan (C) menjual seharga Rp. 22.000, saya juga tidak mengetahui berapa harga jual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram karena tidak pernah ada sosialisasinya, tidak pula ada tulisan berapa harganya dipangkalan tersebut, apalagi saya sering kali kehabisan atau tidak mendapatkan gas ini, kadang habis di pangkalan, baru saja datang sudah habis sehingga Ibu mencari kedaerah lain bahkan terpaksa membeli ke pengecer yang harganya sampai Rp. 25.000 belum

kadang keberadaan beberapa pangkalan yang membuat tidak nyaman seperti sering mencium LPG 3 kilogram yang bocor.

Hal ini senada dalam berita online Antara Sumbar oleh Mario dimana harga jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di Kota Padang Sumatera Barat melampaui batas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, salah seorang pedagang Riyanto menyatakan dirinya membeli *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di Kelurahan Parupuk Tabing seharga Rp. 21.000 dan dia tidak mengetahui berapa harga jual gas bersubsidi tersebut, yang terpenting dapat memenuhi kebutuhannya. (Sumber: Https://sumbar.antaranews.com Tanggal 22 Oktober 2018).

Mengenai Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kilogram pemerintah kota Padang mengeluarkan kebijakan berupa peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kilogram di tingkat pangkalan, Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan dalam peraturan tersebut adalah sebesar 17.000/Tabung.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2014 Pasal 5 pangkalan harus mencantumkan Papan Blank nama usaha yang tertera Harga Eceran Tertinggi namun ditemukan pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing yang tidak mencantumkan Harga Eceran Tertinggi pada papan blank usaha mereka, sehingga masyarakat tidak mengetahui harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram tersebut yang menyebabkan pangkalan melakukan penyimpangan menjual diatas Harga Eceran

Tertinggi, hal ini senada dalam wawancara dengan pangkalan Nurul Halim pada tanggal 19 Desember 2018 yang menyatakan

"Waktu tim pembinaan dan pengawasan melakukan pengawasan Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram pangkalan saya mendapat pemeriksaan seperti sarana dan prasarana yang ada dipangkalan namun mengenai papan blank yang mencantumkan Harga Eceran tertinggi tidak mendapat pemeriksaan".

Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan harus lebih konsisten dalam menjalankan pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram sehingga tidak terjadinya penyelewengan oleh pangkalan mengingat Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang merupakan barang penting dan peruntukannya untuk rumah tangga dan usaha mikro yang memiliki penghasilan pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Melihat dari permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul: "Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram (Studi Kasus di Pangkalan Liquefied Petroleum Gas 3 kilogram Keluruhan Parupuk Tabing Kota Padang)".

B. Identifikasi Masalah

- Kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam tim pembinaan dan pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
- Dalam melaksanakan pengawasan tidak optimal dimana ditemukannya pangkalan di kelurahan Parupuk Tabing yang tidak

- pernah mendapat pemeriksaan oleh tim pengawasan *Liquefied*Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
- Tidak adanya tindakan dan sanksi yang tegas yang diberikan oleh tim pembinaan dan pengawasan dalam melakukan pengawasan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram.
- 4. Tim pengawasan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram hanya melakukan pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada dipangkalan namun mengenai papan blank usaha yang mencantumkan harga eceran tertinggi tidak mendapat pemeriksaan.
- 5. Pangkalan di kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang menjual Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 Tahun 2014.

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga tujuan dan manfaat tercapai dan tidak menyimpang maka perlu adanya pembatasan masalah. Penulis memfokuskan penelitian terhadap Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang.

D. Rumusan Masalah

- Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Harga Eceran Tertinggi
 (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di pangkalan
 Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang?
- 2. Apa Hambatan yang dialami dalam melaksanakan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di pangkalan Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang?
- 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) 3 kilogram di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis bagaimana pengawasan Harga Eceran
 Tertinggi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ditingkat
 pangkalan kelurahan Parupuk Tabing kota Padang oleh tim
 pembinaan dan pengawasan.
- Untuk menganalisis hambatan yang dialami dalam melaksanakan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram di pangkalan Kelurahan Parupuk Tabing kota Padang.
- 3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya Ilmu Administrasi Negara dan sebagai bahan kepustakaan khusunya tentang pengawasan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti pemerintah khusunya Sekretariat Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PT. Pertamina (persero) Kota Padang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan panduan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan terhadap penyimpangan yang terjadi, serta dijadikan panduan bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya pemerintah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

c. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana menambah wawasan penulis dan untuk melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Administrasi Publik pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam meneliti masalah pengawasan Harga Eceran Tertinggi Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram pada tingkat sub penyalur.